

NEWSLETTER

19 Februari 2019



“Desa adalah struktur paling sederhana, yang paling tidak terpelajar dalam susunan negara kita. Apabila desa telah tersentuh dengan teknologi informasi, sebut saja Siskeudes sebagai salah satunya, maka cita-cita membentuk desa-desa di Indonesia menjadi DESA DIGITAL yang menyokong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dari desa, bukan lagi sebuah mimpi.”

DESA DIGITAL

SEBUAH UPAYA MEMBANGUN INDONESIA DARI DESA

Menghadirkan seorang influencer yang telah malang melintang dalam ranah akuntansi publik baik di kalangan pemerintahan maupun perbankan, sharing session Library Café sore itu, Selasa 19 Februari 2019 terasa berbeda. Dr. Jan Hoesada, C.A., C.P.A, anggota komite kerja KSAP yang sedang menulis buku terbarunya tentang Akuntansi Desa, sore itu berjalan santai memasuki Library Café, memesan secangkir kopi sembari menanti para peserta memenuhi aula. Pak Jan, begitu sang influencer biasa disapa, hadir pada kesempatan itu sebagai respons atas undangan dari Kepala BPKP ketika menyampaikan bukunya.



Beberapa menit kemudian acara dimulai dengan *opening* singkat oleh Rahadian Widagdo selaku host pada *sharing session* itu. Tak diduga, Pak Jan, begitu sang *influencer* biasa disapa, mengajak seluruh audiens berdiri dan melakukan beberapa gerakan akrobatik.

Sontak saja suasana menjadi riuh dihiasi oleh senyum dan tawa. “Ini gerakan andalan saya, yang dinanti-nanti para mahasiswa, rahasia tetap aktif dalam usia yang tak lagi muda”. Tak lama berselang, nasionalisme para *audiens* dibangkitkan dengan bersama-sama menyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa.



RAYUAN PULAU KELAPA

Tanah airku Indonesia
Negeri elok amat kucinta
Tanah tumpah darahku yang mulia
Yang kupuja sepanjang masa

Tanah airku aman dan makmur
Pulau kelapa yang amat subur
Pulau melati pujaan bangsa
Sejak dulu kala

Melambai-lambai nyiur di pantai
Berbisik-bisik raja kelana
Memuja pulau nan indah permai
Tanah airku Indonesia

Rupanya, lagu yang syahdu tersebut menjadi *bridging* untuk memasuki pemaparan yang lebih serius, tentang desa digital dan upaya membangun Indonesia dari desa. Menurut Pak Jan, ujung tombak suatu bangsa adalah desa, apalagi dalam sebuah bangsa yang memperjuangkan swasembada pangan. Desa memang telah identik dengan lahan pertanian, perkebunan, dan para penduduknya yang mengandalkan sektor agraris sebagai sumber mata pencaharian. Maka tak salah jika menurut Pak Jan, apabila desa lebih sejahtera dan produktif maka negara ini akan lebih makmur dan aman.

Di sisi lain, terminologi Desa Digital terdengar begitu ambisius dan membuat para pendengarnya sejenak berfikir, “apakah mungkin?”. Terlebih bagi para auditor BPKP yang telah banyak berkecimpung dalam mengawal pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akhir-akhir ini semakin sibuk mengawal dana desa. Tak hanya provinsi, kabupaten dan kota, desa yang ribuan jumlahnya di Indonesia menghadirkan semakin banyak tantangan dan pengelolaan keuangan dan pengawasan. Maka kemudian Pak Jan dengan penuh keyakinan bercerita bahwa Desa Digital bukanlah sebuah mimpi.

“DIGITALISASI TELAH MASUK KE DESA”

Teknologi informasi telah masuk hingga ke desa, salah satu buktinya adalah kehadiran “Siskeudes”, aplikasi besutan auditor BPKP dan Kementerian Dalam Negeri, yang telah hampir sepenuhnya diterapkan di lebih dari 75.000 desa di seluruh penjuru Indonesia. Dalam hal ini, desa-desa di Indonesia boleh dibilang sebagai desa termmodern di seluruh dunia. Begitu besar dan majemuknya struktur pemerintahan kita namun masih bisa dicover oleh sebuah sistem yang canggih. Mudah-mudahan kehadiran Siskeudes membantu meningkatkan kualitas pembangunan di desa dan menjauhkannya dari korupsi. Pak Jan percaya bahwa teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk keperluan semacam ini juga akan memudahkan BPKP sebagai auditor untuk melakukan pemeriksaan secara langsung, kontinyu, dan lebih efisien.



BERKACA PADA NEGERI TETANGGA

Mari tengok ke negeri jiran kita, Malaysia. Di sana, desa digital diinisiasi oleh Kementerian Luar Bandar dan Wilayah, bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia, serta didukung oleh perlemen dan Kementerian Pertahanan. Unik ya, bahkan Kementerian Pertahanan turut berperan hingga ke desa, sebab bagi negara tersebut pertahanan sebuah negara yang paling hakiki justru dimulai dari desa. Kebijakan desa digital di Malaysia berupa pendirian *mall online* di desa sejak Oktober 2017, kewajiban bagi toko serba ada atau *hypermarket* untuk menampung dan memasarkan produk buatan usahawan dan petani desa (setidaknya 30% dari produksi desa harus dijual di *hypermarket*).

Apa yang dilakukan di Malaysia ini sangat perlu untuk ditiru, sebab pemasaran telah lama menjadi masalah dalam pengelolaan produk pertanian di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, sekitar 70% dari hasil panen di desa tidak bisa dipasarkan di kota karena telah membusuk dalam perjalanannya. Karena itu, digitalisasi dan kehadiran *hypermarket* yang lebih profesional dalam pengemasan produk diharapkan bisa membantu memangkas jalur distribusi yang panjang ini.

Sebenarnya, rencana membentuk desa digital telah digalakkan di beberapa daerah, sebut saja salah satunya adalah Provinsi Jawa Barat yang telah menargetkan pemasaran digital hasil budidaya ikan mencapai 100% pada 5 tahun ke depan. Pemerintah Jabar bahkan menggandeng beberapa *partner* seperti Telkom University dan Bank Jabar Banten. Pemrov bahkan memutuskan untuk menolak gerakan urbanisasi supaya generasi mudanya lebih aktif membangun desa. Pertanyaannya, apakah daerah lain telah mempunyai inisiatif untuk gerakan yang serupa?



AKUNTANSI DESA DIGITAL

Untuk memudahkan kelancaran transaksi, sistem pembayaran secara non-tunai juga perlu diterapkan di desa. Dari segi penyaluran dana desa, cara ini memperkecil potensi penyelewengan dana yang biasa muncul berupa “amplop-amplop” setoran khusus. Sedangkan dari sisi akuntansi, akurasi pencatatan transaksi akan lebih *real time* dan lebih mudah diawasi.

“Transaksi *online* seribu kali lebih mudah diaudit”, kata pak Jan.



Secara khusus untuk mewujudkan sistem pembukuan yang *online* ini, Pak Jan menaruh harapan besar kepada BPKP untuk memberikan support, bahkan menjadi provokator jika perlu. BPKP, kata Pak Jan, mempunyai posisi yang sangat strategis sebagai mediator yang mampu mengkoordinasi institusi-institusi dalam pemerintahan, sehingga sangat mampu untuk menjadi provokator bagi kebijakan-kebijakan lintas sektoral.

SESI TANYA JAWAB

Dalam sesi tanya jawab, Antar Sianturi, salah satu peserta *sharing session* menyatakan keprihatinannya bahwa banyak organisasi besar telah gagal dalam memprovokasi. Banyak kebijakan yang sebenarnya dianggap inovatif namun tidak dapat diterapkan karena kalah dalam proses negoisasi para pihak yang terlibat, sebagai contoh tentang tata cara pemilu secara *online*. Lalu, membentuk desa digital, yaitu memasarkan produksi pertanian desa dengan bantuan teknologi pasti lebih sulit lagi. Menanggapi hal ini, Pak Jan berpendapat bahwa hal tersebut mungkin sulit namun bukan mimpi. Terkait hal ini, pemerintah kabupaten sangat perlu memberikan insentif agar pihak swasta mau berinvestasi, utamanya untuk membantu permasalahan dalam pemasaran tersebut.

Selanjutnya, Iskandar Novianto, mengungkapkan bahwa sampai dengan Desember 2018 implementasi Siskeudes versi awal telah mencapai 93,33% dari populasi desa.

Seiring dengan perubahan regulasi, perlu dilakukan penyesuaian aplikasi dan diluncurkan Siskeudes versi 2.0, di mana sayangnya hingga Februari Tahun 2019 baru diimplementasikan pada sebanyak 33% dari total desa. Menurut Iskandar, mengundang desa untuk sosialisasi siskeudes versi 2.0 sangat berat karena peraturan yang selalu berubah-ubah.

Meskipun begitu, seperti biasa, BPKP selalu optimis dapat mencapai target mendorong implementasi seoptimal mungkin. Pada Maret 2019 ditargetkan lebih dari 90% desa harus telah mengimplementasikan Siskeudes 2.0 sebagai aplikasi yang sangat membantu dalam mengelola dan menghasilkan laporan keuangan desa.



PENUTUP

Sebagai penutup, Pak Jan mengungkapkan bahwa beliau sedang menyusun buku yang di dalamnya juga membahas strategi pembentukan desa digital di seluruh Indonesia. Untuk merampungkannya, Jan berharap para peserta *sharing session* dapat bergabung sebagai anggota lingkaran maya untuk berdiskusi membahas segala sesuatu tentang pembentukan desa digital tersebut. Dari *sharing session* sore itu dapat disimpulkan bahwa bagi pak Jan, perhatian lebih harus diberikan kepada desa. Semua pihak dengan perannya, termasuk Pak Jan dan BPKP, semestinya semakin berkontributif untuk mendorong pembangunan desa, digitalisasi adalah salah satu bentuknya.



 ALL YOU CAN LEARN

 ENJOY THE COFFEE

 BRING TOGETHERNESS